

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Erat kaitannya pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat dan gambaran keberhasilan implementasi. Begitu pula kebijakan ekonomi makro di suatu daerah yang pada akhirnya berdampak positif bagi pemerintah baik pusat maupun daerah. Perkins dalam penelitian wardilah tahun 2012 menyatakan bahwa pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga sebagai argumen untuk memuliakan negara.

Untuk mengukur keberhasilan ekonomi suatu daerah tentunya terdapat nilai atau komponen yang digunakan, yaitu kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self-esteem*), dan kebebasan (*freedom*) merupakan tujuan yang harus dicapai tiap masyarakat (Todaro, 2000). Implementasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan sasaran utama bagi negara karena menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan negara. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dimana salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi adalah Indeks Pembangunan Manusia.

Beberapa indikator yang sering dipakai dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia adalah indikator kesehatan (dilihat dari angka harapan hidup), pendidikan (dilihat dari angka melek huruf orang dewasa serta tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan, dan tinggi) dan standar layak hidup (diukur dari daya beli serta penghasilan), dari ketiga indikator tersebut dapat dikatakan belum dapat mengukur pembangunan manusia secara menyeluruh, tetapi ketiga indikator tersebut mampu menggambarkan sudut pandang yang

lebih luas terhadap rumitnya menghitung kemajuan manusia dari rumitnya penghasilan dan kesejateraan itu sendiri (UNDP, 1990)

Menurut Guritno (2001) peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang harus dilaksanakan dalam mendorong perekonomian, yaitu :

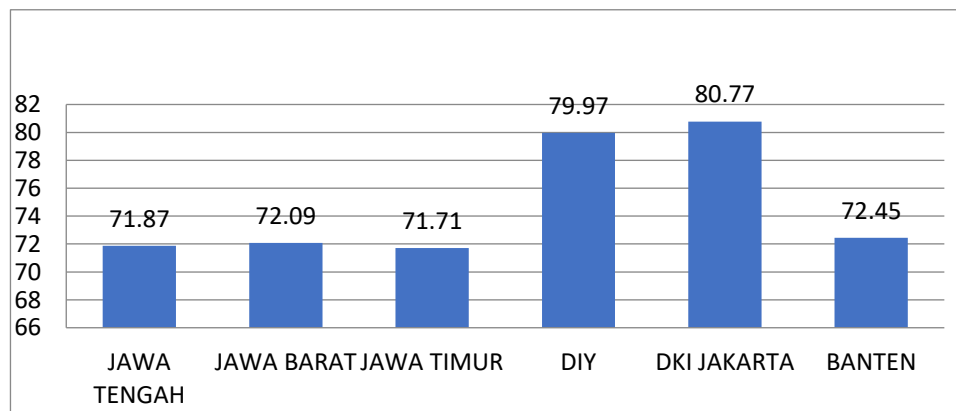
1. Peran Stabilisasi, dalam menjaga prekonomian pemerintah berperan sebagai stabilitor sehingga prekonomian berjalan dengan normal.
2. Peran Distribusi, untuk mencapai alokasi sumberdaya ekonomi secara fisien pemerintah membuat kebijakan-kebijakan hingga mencapai tiap lapisan masyarakat.
3. Peran Alokasi, pemerintah didorong untuk menentukan seberapa besar sumber daya yang dimiliki agar dapat digunakan untuk membuat barang-barang individu, pemerintah menentukan barang yang dibutuhkan publik, serta mengukur seberapa besar yang harus disediakan oleh pemerintah dan seberapa besar yang harus disediakan oleh rumah tangga perusahaan. Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki pemerintah mempunyai keterbatasan.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai daerah yang memiliki potensi, keunggulan dan perbedaan alokasi yang berbeda-beda, perbedaan alokasi anggaran bisa dilihat dari jumlah pemberian anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada masing-masing daerah. Dana yang diberikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta beberapa pinjaman dari luar negeri serta sumber dana pemerintah lain.

Pemerintah daerah menggunakan APBD untuk membiayai pembangunan di sektor yang berkaitan dengan pembangunan manusia (Maryani, 2010). Dalam undang-undang mengenai Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 yang berbunyi dengan tujuan memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara lebih spesifik pemerintah mengalokasikan belanja melalui pengeluaran yang mendukung dan tepat sasaran hingga memiliki dampak terhadap meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.

Berikut adalah grafik perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Pulau Jawa Tahun 2016-2020.



Sumber : Badan Pusat Statistik (2020)

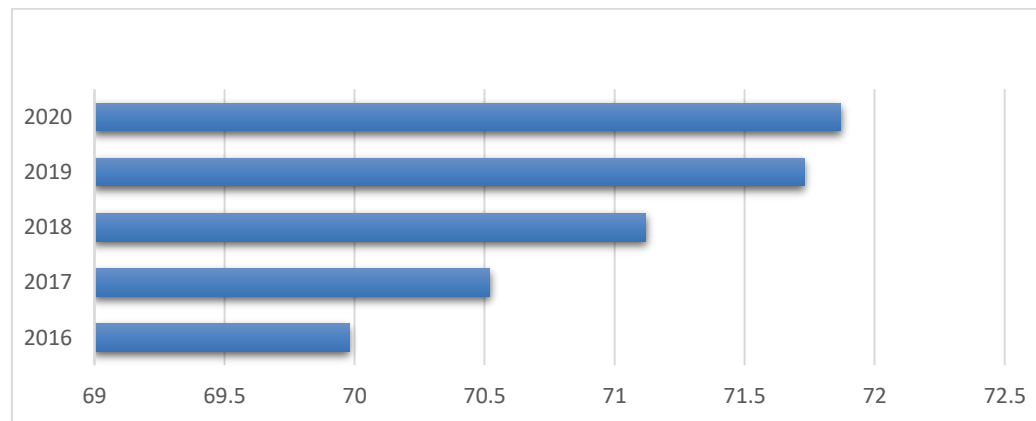
Gambar 1.1

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di pulau Jawa
Di Pulau Jawa Tahun 2020

Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian, pusat pemerintahan serta pusat kegiatan sosial dan ekonomi lainnya. Selain itu, sumber daya manusia terkonsentrasi hampir 60% dari total jumlah penduduk di Indonesia berada di Pulau Jawa yaitu sekitar 145 juta jiwa dengan kondisi perekonomian yang lebih baik. Dari beberapa provinsi yang berada di Pulau Jawa, DKI Jakarta menduduki urutan tertinggi di Pulau Jawa. Disusul DIY di urutan kedua, Banten di urutan ketiga, Jawa Barat di urutan ke empat, sedangkan Jawa Tengah di urutan ke lima, dan Jawa Timur menduduki urutan paling bawah.

Jawa Tengah memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, namun tidak sejalan dengan perkembangan pembangunan manusianya. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah memberikan keluasaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pembangunan daerah secara lebih mandiri, khususnya terkait pembangunan manusia. Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreatifitas masyarakat. Dengan begitu penduduk dapat menyerap dan mengelola sumber daya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Berikut adalah tabel perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.



Sumber : Badan Pusat Statistik (2020)

Gambar 1.2

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016-2020

Pada gambar diatas memperlihatkan bahwa dalam kurun 5 tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan terus menerus dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2016 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah sebesar 69.98, tahun 2017

meningkat menjadi 70.52, tahun 2018 meningkat menjadi 71.12, tahun 2019 meningkat menjadi 71.73, dan ditahun 2020 meningkat menjadi 71.87.

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia. Salah satu kereteria yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Melalui peningkatan parameter tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Ini dikarenakan adanya heterosgenitas individu, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat yang berbeda-beda sehingga menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolak ukur utama dalam menghitung tigtat ektifitas pembangunan. Akan tetapi keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dipisahkan dari peran sertakinerja pemerintah dalam menciptakan regulasi bagi terciptanya ketertiban sosial.(Mirza, 2012).

Pembangunan manusia merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan pembangunan di sektor lainnya. Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia. Indikator tersebut dapat berpengaruh pada produktivitas kerja masyarakat, jika Indeks Pembangunan Manusia rendah maka produktivitas masyarakat juga rendah. Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia adalah kemiskinan. Produktivitas kerja masyarakat yang rendah akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Dalam ajaran agama islam memandang bahwa manusia mempunyai peringkat tertinggi di antara mahluk-mahluk lainnya. Hal ini terdapat dalam surah Al-Baqarah (2) :30

افِيهِ أَنْجَعَلُ قَالُوا ۖ خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلٍ إِنِّي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ
مَا مَأْعَدُّ إِنِّي قَالَ ۖ لَكَ وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ الدِّمَاءُ وَيَسْئُوكُ فِيهَا يُفْسِدُ مَنْ
تَعْلَمُونَ لَا

Terjemahnya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Tafsir dari ayat di atas atau makna dari ayat di atas adalah sangat jelas bahwa Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah memiliki arti yaitu sebagai pengganti Allah SWT dalam mengelolah bumi sekaligus memakmurkannya, manusia diberi tugas untuk menggali potensi-potensi yang terdapat di bumi ini, mengolahnya dan menggunakannya dengan baik sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian terkait pengaruh Belanja Daerah, PDRB (produk domestik regional bruto), dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Belanja Daerah, PDRB, dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia Periode 2016-2020 (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah)”**

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup agar penelitian ini tepat sasaran. Dalam penelitian ini hanya akan membahas pengaruh dari Belanja Daerah,

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang sudah dikemukakan diawal, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2016-2020
2. Apakah PDRB (produk domestik regional bruto) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2016-2020
3. Apakah Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2016-2020

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sbagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2016-2020.
2. Untuk menganalisis pengaruh PDRB (produk domestik regional bruto) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2016-2020.
3. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2016-2020.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadikan salah satu acuan dalam merumuskan kebijakan terkait dengan masalah indeks pembangunan manusia
2. Bagi akademis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.
3. Bagi publik, diharapkan penelitian ini bisa memberi informasi dan gambaran mengenai indeks pembangunan manusia.